



RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2025

**MENGHAPUS STIGMA
DENGAN
MENGUBAH PARADIGMA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah	31
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	34
BAB V Penutup	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 3.1 Tema Pembangunan Nasional	29
Gambar 3.2 Pendukung Tema Pembangunan Nasional	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023	11
Table 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor- Faktor Pendukung Keberhasilan	15
Table 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor	17
Tabel 2.4 Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023	19
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025	21
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kota Bogor perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

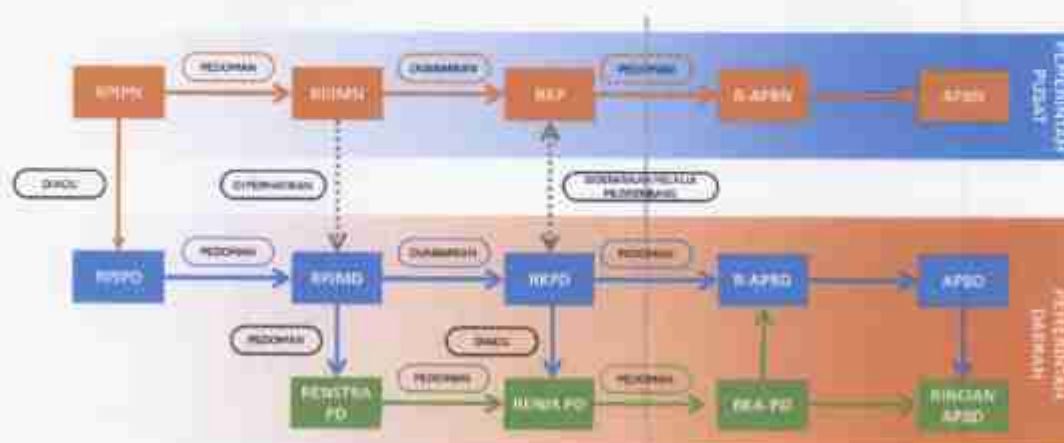
Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali

Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

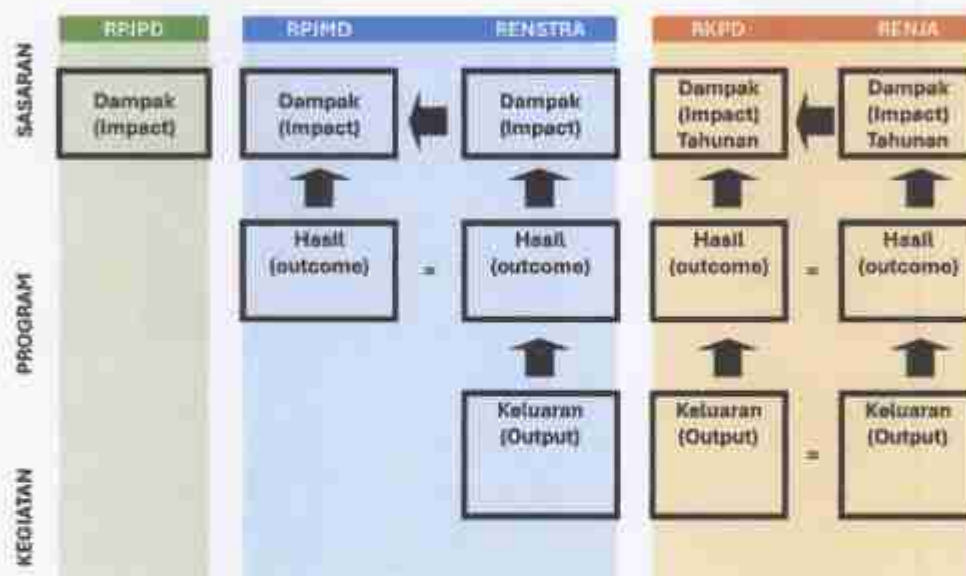
Gambar 1.1
Hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat in-line dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Bogor disusun berdasarkan kebijakan

pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 dan RPD Kota Bogor tahun 2025-2026. Berikut Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 326);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
42. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Huam/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Barat;
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
50. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.
51. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6)
52. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2023. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 disajikan pada table 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN (BIDANG PENGAWASAN)						
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3.4	3.4	100.00
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A	AA	113.23
		Gap Analysis Kompetensi	Persentase	14.3	14.3	100.00
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah	Persentase	100	100	100.00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	100.00
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi	Persen	100	100	100.00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	53	54	101.89
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	100.00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53	53	100.00
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100	100	100.00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100.00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100.00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	7	100.00
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00
6.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	Persen	100	100	100.00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	67	67	100.00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19	100.00
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100.00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	7	100.00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	100.00
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD lingkup Inspektoral ber kondisi baik	Persen	100	100	100.00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	100.00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	92	92	100.00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi/ SARF minimal "BB"	Persen	78	94.44	121.08
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	78	100	128.21

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas internal	Persen	90	8	8.89
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	Persen	93	91.37	101.37
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	90	100	103.26
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100.00
		Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah	Persen	100	100	100.00
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Kegiatan	2	2	100.00
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Kegiatan	2	2	100.00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	36	100.00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	100.00
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Persentase laporan pengeduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	Persen	100	100	100.00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	100.00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1	100.00
6.01.03	PROGRAM PERUMAHAN KEBUKUKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SMP	Persen	100	100	100.00
		Jumlah Unit Kerja yang dihasilkan untuk memipatkan Produk Zi menuju WSK/WEBM	Unit Kerja	2	4	200.00
		Persentase Capaian MCP KPK	Persen	53.5	88	91.58
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko	Persen	90	100	111.11
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan Zi menuju WSK	Unit Kerja	11	11	100.00
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	Kegiatan	2	2	100.00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Parangkat Daerah	36	36	100.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN KINERJA
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	36	36	100,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	36	36	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada Indikator Persentase Capaian MCP KPK pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi target tidak tercapai, faktor penghambat dengan tidak tercapainya indikator tersebut dikarenakan terdapat komponen yang sifatnya substantif tidak dapat dipenuhi berdasarkan hasil evaluasi oleh KPK seperti pada komponen perencanaan dan penganggaran dengan nilai hasil evaluasi sebesar 90 terkait perencanaan dan penganggaran mandatory spending masih terdapat yang belum sesuai, komponen perizinan dengan nilai hasil evaluasi sebesar 72 akibat belum disusunnya laporan pengawasan penanaman modal dan perizinan oleh DPMPTSP, komponen pengawasan APIP dengan nilai hasil evaluasi sebesar 82 akibat ketersediaan SMD APIP belum dapat terpenuhi sesuai dengan rekomendasi oleh BPKP, komponen optimalisasi pajak daerah dengan nilai hasil evaluasi sebesar 80 akibat belum adanya database penanganan piutang pajak dan potensi penerimaan pajak dan komponen pengelolaan barang milik daerah dengan nilai hasil evaluasi sebesar 77 akibat belum terpenuhinya target sertifikasi tanah dan belum terdapat aktifitas dan administrasi terkait penertiban terhadap barang milik daerah. Upaya yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mencapai Indikator tersebut dengan melaksanakan sosialisasi dan kordinasi dengan Perangkat Daerah yang terlibat dalam menanggapi hasil evaluasi dalam Upaya pencapaian MCP KPK.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan factor -faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-
Faktor Pendukung Keberhasilan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN YANG MEMENUHI TARGET KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
6.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	Adanya perencanaan kinerja yang memadai, penyerapan anggaran yang sesuai dengan target dan jadwal, realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, serta pelaporan yang tepat waktu.
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tepat waktu
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilakukan secara berkala
6.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Adanya Pelaporan administrasi keuangan yang tepat waktu
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan
6.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Adanya komitmen pimpinan, kerja sama yang baik dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya ketersediaan anggaran dan kebutuhan diklat dalam menunjang kualitas APIP
6.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Adanya ketersediaan barang dan jasa serta penyedia barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, kinerja pejabat/panitia pengadaan barang dan jasa yang baik.
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Logistik Kantor
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Adanya pemeliharaan Sistem Aplikasi
6.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAH DAERAH	Ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana, inventarisasi
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Ketersediaan Mebeulair
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Adanya anggaran jasa penunjang
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Adanya anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN YANG MEMENUHI TARGET KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya anggaran Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Adanya komitmen dalam menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.01.02.2.01	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Komitmen dalam pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Komitmen dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
6.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Adanya komitmen dalam menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.01.03.2.02	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Adanya komitmen dalam menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Sebagaimana faktor penghambat dan pendukung pada Tahun 2023 yang telah dijelaskan pada point 1 dan 2, maka beberapa kebijakan/tindakan tersebut dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025, sehingga dapat menjaga kualitas pencapaian untuk Tahun 2025.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 disajikan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan	Target Akhir
1	Level Kapabilitas APIP	Level	3 (3,380)	3 (3,000)	3 (3,520)	117,33	4,14	3 (3,000)
2	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	73,81	81	85,22	105,21	15,46	82
3	Level Maturitas SPIP	Level	2	3 (3,000)	3 (3,296)	109,87	64,80	3
4	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	16,08	22,50	19,94	88,62	24,00	22,50
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	73,06	75	76,18	101,57	4,27	75,5

Berdasarkan table diatas terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor untuk periode tahun 2019-2024 dalam mendukung 2 (dua) Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah yang didukung pencapaiannya melalui 2 (dua) Indikator.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang didukung pencapaiannya melalui 3 (tiga) Indikator.

Berikut hasil Analisa pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 yang disandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP dengan target indikator level 3 dengan point 3,000 dan realisasi level 3 point 3,520 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.09.03/LHP-879/PW10/6/2023 perihal : Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023, maka capaian untuk Level Kapabilitas APIP tahun 2023 sebesar 117,33 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir

- sebesar 117,33 persen. Melihat hasil positif ketercapaian level kapabilitas APIP tersebut disebabkan adanya peningkatan dari capaian sebelumnya tahun 2022 pada elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.
2. Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah target point 81 dan realisasi point 85,22 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bogor Nomor : 000.8.6/7B.Org perihal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023, maka capaian untuk Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 sebesar 105,21 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 103,93 persen. Melihat hasil positif ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah, masih perlu adanya upaya perbaikan capaian target terhadap bobot penilaian Reformasi Birokrasi yang secara pencapaiannya masih dibawah 80 persen yang terdapat pada komponen Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian 70,44 persen, Capaian Indikator Kinerja Utama dengan capaian 75 persen, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas dengan capaian 76 persen dan Nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan capaian 50,13 persen.
 3. Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP dengan target indikator level 3 dengan point 3,000 dan realisasi level 3 point 3,296 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 perihal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, maka capaian untuk Level Maturitas SPIP tahun 2023 sebesar 109,87 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 109,87 persen. Melihat hasil positif ketercapaian Level Maturitas SPIP tersebut masih perlu dilakukan peningkatan dalam mencapai Bobot Penetapan Tujuan Struktur dan Proses, Bobot Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan dan Bobot Pencapaian Tujuan.
 4. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota target point 22,50 dan realisasi point 19,94 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor : 700/551-itda perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023, maka capaian untuk Nilai hasil Evaluasi

Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota tahun 2023 sebesar 88,62 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 88,62 persen. Melihat hasil tersebut perlu ada perbaikan pada Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal khususnya Inspektorat Daerah Kota Bogor terhadap komponen Implementasi SAKIP yang memberikan dampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun apabila dibandingkan dengan capaian Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 24 persen.

5. Indikator Kinerja Utama Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 75 persen dan realisasi sebesar 76,18 persen sesuai dengan hasil yang tertuang dalam website : <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=6d390aca> yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka capaian untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi tahun 2023 sebesar 101,57 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 100,90 persen. Namun apabila dibandingkan dengan capaian Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 4,27 persen.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota Bogor merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2023, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

KEKUATAN	KELEMAHAN
Inspektorat sebagai Quality Assurance, Early Warning System di Pemerintah Daerah Kota Bogor	Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadai dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai
Inspektorat sebagai pendamping Perangkat Daerah dalam 5 aspek : pengelolaan Aset, Keuangan, SDM, Pengendalian Intern dan sarana prasarana	Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa
Inspektorat sebagai APIP yang membantu Wali Kota dalam urusan bidang pengawasan	Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadai

KEKUATAN	KELEMAHAN
Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko	Belum banyak mengembangkan teknologi pengawasan berbasis IT

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu :

PELUANG	TANTANGAN
Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai pengemban tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan dan pembinaan di semua unit kerja yang berada di bawah kewenangan Wali Kota.	Penugasan mandatori dari K/L yang harus dilaksanakan Inspektorat dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki menuntut Inspektorat untuk memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal berdasarkan tingkat risiko yang ada disamping harus semakin memperkuat kompetensi SDM yang dimiliki dengan berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dalam pengawasan
MOU kerjasama antara APIP dan APH terkait penanganan pengaduan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi	Perubahan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat
Adanya kebijakan alokasi anggaran Pengawasan untuk peningkatan kapasitas APIP dan pemenuhan sarana prasarana	Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah sebagai Quality Assurance dan Early Warning System

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring evaluasi;
2. Mengoptimalkan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Bogor;
4. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (early warning) dalam mencegah fraud maupun penyimpangan lainnya; dan
6. Mengoptimalkan fungsi asistensi dan pendampingan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2025

No	Kode				KEMUNGKINAN AKHIR RUPD					KEMUNGKINAN PROJEKSI					Catatan
					Struktur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikasi (Rp)	Lokasi	Struktur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikasi (Rp)	Lokasi	
					INSPEKTORAT			25.957.551.341,00					25.957.551.341,00		
	6				UNSUB PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			25.957.551.341,00					25.957.551.341,00		
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH			25.957.551.341,00					25.957.551.341,00		
1	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Risiko di lingkup Perangkat Daerah: Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup perangkat daerah: Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah: Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah: Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah: Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemasukan Penyelenggaraan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Pembinaan Realisasi Anggaran Terhadap DPA	100 % 13,03 Nilai 21,7 Nilai 27,79 Nilai 28,16 Nilai 88,38 Nilai →95 %	25.486.826.741,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi rencana tindak pengendalian Risiko di lingkup Perangkat Daerah: Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup perangkat daerah: Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di perangkat daerah: Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup perangkat daerah: Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup perangkat daerah: Rata-Rata Nilai SKM Aspek Pemasukan Penyelenggaraan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan Pembinaan Realisasi Anggaran Terhadap DPA	100 % 13,03 Nilai 21,7 Nilai 27,79 Nilai 28,16 Nilai 88,38 Nilai →95 %	25.486.826.741,00		
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	100 %	272.724.600,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	100 %	272.724.600,00		
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	47.268.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Saranwangi ang		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	47.268.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Saranwangi ang	
	6	01	01	2.01	0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	226.385.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Saranwangi ang		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	226.385.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Saranwangi ang	
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target Waktu dan Sesuai Regulasi	100 %	18.886.400.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Target Waktu dan Sesuai Regulasi	100 %	18.886.400.000,00		

6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19.833.858.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	19.833.858.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.02	0002	Kendaraan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD									
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	44.744.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	44.744.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	884.752.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	884.752.200,00		
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	584.752.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	584.752.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %	1.232.218.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	100 %	1.232.218.400,00		
6	01	01	2.06	0002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	158.277.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	158.277.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	76.323.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	76.323.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	632 Paket	44.006.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	632 Paket	44.006.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi SKPD									
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Evaluasi SKPD	7 Laporan	912.544.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Evaluasi SKPD	7 Laporan	912.544.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									

						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPO	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPO	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungut Uraan Pemerintahan Sesuai RKSDMD	80 %	417.820.000,00			Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pemungut Uraan Pemerintahan Sesuai RKSDMD	80 %	417.820.000,00	
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mobil										
					Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	1 Unit	219.727.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang			Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	1 Unit	219.727.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	107.892.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	107.892.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang	
6	01	01	2.08		Pengadaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	100 %	850.854.430,00			Pengadaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	100 %	850.854.430,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.321.551,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	179.321.551,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479.432.884,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	479.432.884,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Surenanglang	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkecukupan Baik	100 %	1.082.154.302,00			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkecukupan Baik	100 %	1.082.154.302,00	
6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagakny	7 Unit	270.380.581,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pagakny	7 Unit	270.380.581,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
	6	01	01	2.08	0006	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	66.462.542,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	66.462.542,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	745.211.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	745.211.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal "30" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APD	70,63 Persentase 90,2 Persentase 90 Persentase	825.673.800,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai evaluasi kinerja internal minimal "30" Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APD	70,63 Persentase 90,2 Persentase 90 Persentase	825.673.800,00	
	6	01	02	2.01		Pengembangan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemertintahan Daerah Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "30"	36 Perangkat Daerah 100 % 70,63 Persen	544.961.000,00		Pengembangan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemertintahan Daerah Persentase PD yang mendapatkan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Minimal "30"	36 Perangkat Daerah 100 % 70,63 Persen	544.961.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	101.604.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	101.604.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
	6	01	02	2.01	0002	Revisi Laporan Kinerja									
						Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	36 Laporan	35.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	36 Laporan	35.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
	6	01	02	2.01	0004	Revisi Laporan Keuangan									

						Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Keuangan	1 Laporan	118.881.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Keuangan	1 Laporan	118.881.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
8	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	187.723.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	187.723.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
9	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tidak Lurus Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lurus Hasil Pemeriksaan APF	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tidak Lurus Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lurus Hasil Pemeriksaan APF	4 Dokumen	41.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tidak Lurus Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tidak Lurus Hasil Pemeriksaan APF	4 Dokumen	41.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
8	01	02	2.02		Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan yang Diakibatkan Sesuai Kewenangan	100 %	80.712.800,00		Pengembangan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan yang Diakibatkan Sesuai Kewenangan	100 %	80.712.800,00		
8	01	02	2.02	0001	Peningkatan Penyelidikan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelidikan Keuangan Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	33.186.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Penyelidikan Keuangan Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	33.186.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
8	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	27.517.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 Laporan	27.517.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	
2	6	01	02		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai kelas "75" Nilai Capaian MCP KPI dalam rata-rata nasional Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPP pada level 3	12 Persentase 27 Persentase 90 Persentase	846.023.000,00		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai kelas "75" Nilai Capaian MCP KPI dalam rata-rata nasional Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan struktur dan proses SPP pada level 3	12 Persentase 27 Persentase 90 Persentase	846.023.000,00		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPR, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Zona Integritas	36 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	846.023.000,00		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPR, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Zona Integritas	36 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	846.023.000,00		

6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	333.868.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	333.868.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6 perangkat daerah	290.673.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6 perangkat daerah	290.673.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	165.005.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	165.005.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	55.416.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 perangkat daerah	55.416.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Seranwangi ang	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan oleh Masyarakat yang diajukan melalui tahapan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang kemudian dilakukan penelaahan atau klarifikasi usulan program dan kegiatan masyarakat melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 dengan kesepakatan hasil musrenbang Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang sesuai dengan prioritas Pembangunan daerah Kota Bogor maupun penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

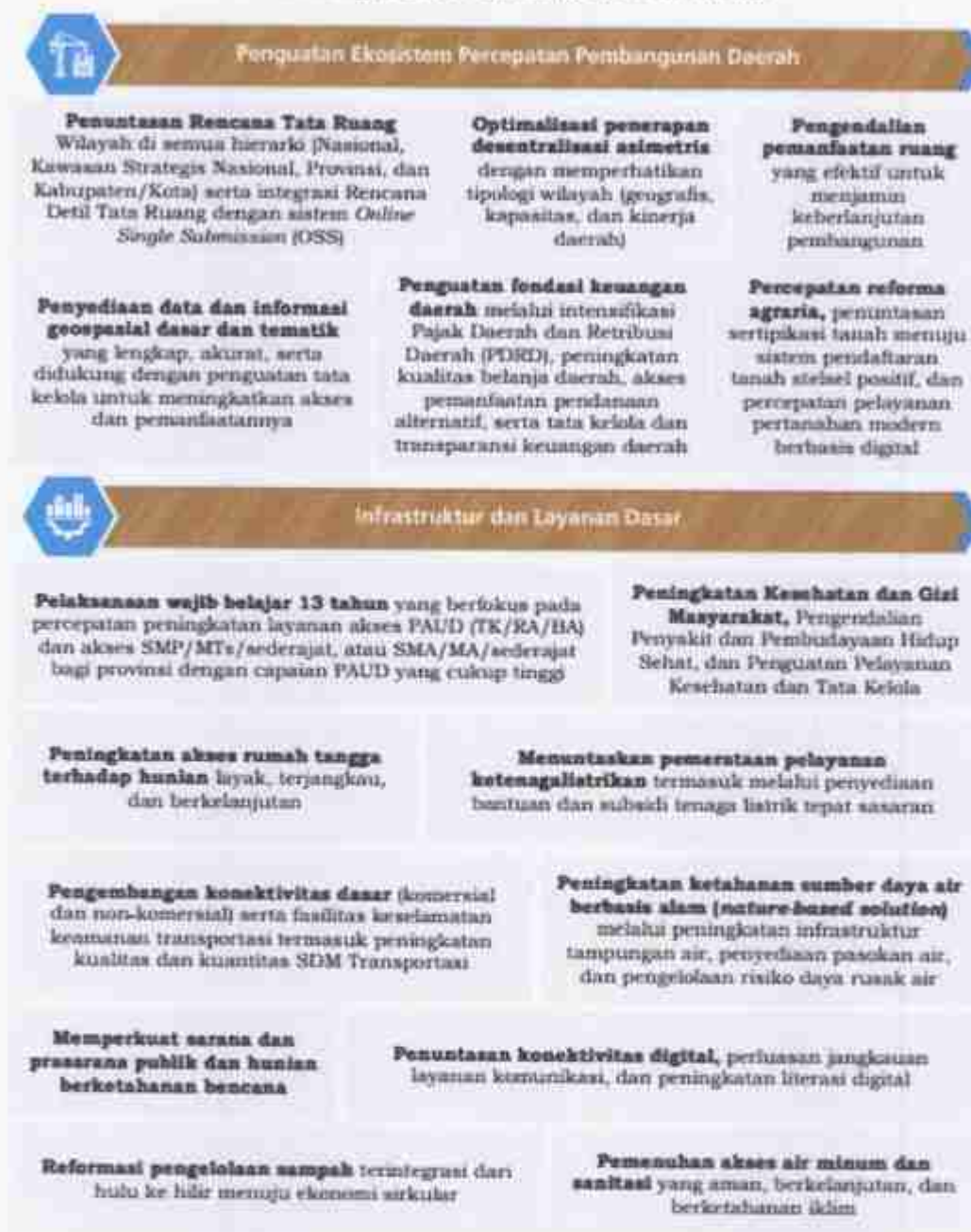
Pada Tahun 2025, Tema Pembangunan Nasional yang dipublikasikan dalam Forum Discussion Group (FGD) penyusunan RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang berfokus pada komponen komponen SDM Berdaya saing dan produktif, Infrastruktur untuk peningkatan produktifitas dan Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan. sebagaimana termuat pada ilustrasi di bawah ini :

Gambar 3.1
Tema Pembangunan Nasional



Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Gambar 3.2
Pendukung Tema Pembangunan Nasional



Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal;
3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan;
4. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan;

5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah; dan
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tema Pembangunan Kota Bogor dalam RKPD Tahun 2025 adalah "Penyiapan Sumber Daya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas". Adapun fokus pembangunan ekonomi tahun 2025 adalah Mendorong pengembangan potensi pariwisata heritage dan ilmiah, kampung tematik, ekonomi kreatif, penguatan sumberdaya manusia kreatif dan UMKM, mengakselerasi pelayanan investasi, mengembangkan sarana prasarana perekonomian, serta meningkatkan produktivitas. Dengan memperhatikan tema dan fokus pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor serta tujuan dan sasaran Rencana Strategi Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2025

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET
					2023	2025
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah		Persentase capaian nilai aspek evaluasi internal sakip kota terhadap bobot aspek evaluasi sakip	Persen	67.76	71.2
			Persentase capaian nilai aspek struktur dan proses SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek struktur proses sipip	Persen	58.42	59.20

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET
					2023	2025
			Persentase capaian nilai komponen ketaatan terhadap peraturan pada aspek pencapaian tujuan SPIP terhadap nilai maksimal indeks aspek pencapaian tujuan spip	Persen	100	100
		Meningkatnya peran APIP yang efektif dalam rangka mewujudkan reformasi Birokrasi dalam bidang pengawasan	Nilai SAKIP Tingkat Kota Aspek Evaluasi Kinerja Internal	Nilai	16.08	18.01
			Indeks Kematangan Komponen Struktur dan Proses SPIP Terintegrasi	Indeks	2.9116	2.9475
			Indeks Kematangan Komponen Hasil Aspek Ketaatan SPIP Terintegrasi	Indeks	1.000	1.000
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2	90.2
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	86.96	90
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	90.2	90.2
2	Terciptanya Kinerja Organisasi Bebas Korupsi dan Birokrasi bersih dan melayani		Jumlah Unit Kerja yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	N/A	1
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Dan Pengelolaan Zona Integritas Pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	4	5
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas		Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Kategori	AA	AA
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90,58	90,58

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN	TARGET
					2023	2025
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan			95
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	91	91
			Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi >100)	Inovasi	N/A	1
			Indeks Survey Kepuasan Masyarakat di lingkup Perangkat Daerah	Indeks	85,36	88,40
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	3.414	3.536
			Level Kapabilitas APIP	Level	3	3

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja disertai pagu indikatifnya. Secara khusus, program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut sesuai dengan hasil entry dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025

35

[illegible]

147

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / SUBURUSAN / PROGRAM / SUBPROGRAM / SUBKESKIDATAN / SUBKESKIDATAN	REKAMATASI PROGRAM / SUBPROGRAM / SUBKESKIDATAN	TARGET AKHIR PERIODIK KENDALIAN (KENDALIAN)	REKAMATASI CAPAIAN BENCANA OPSI TAHUN 2024	REKAMATASI CAPAIAN BENCANA OPSI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA SAR KEMANGSA PENGADILAN						KELOMPOK SASARAN	PELAKSANA MAJU BENCANA TAHUN 2024		PEMERINTAH SASARAN PENGEMBAKIAN JAWAB
							TARGET 2024	PACU AKHIR (PA)	LOKASI	SUMBER DATA	PROGRES			TANGGAL	PACU AKHIR (PA)	
											MAKIN	BARUK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Jumlah Kegiatan Akutansi Kendali dan Baku serta Indikator Pengukuran dan Penilaian Kinerja	2 Kegiatan	0	1	2 Kegiatan	100.000.000.000	Kota Bogor, Bogor Timur, Bogor Tengah	PENGKOTATAN AKUTANSI (PAK)	100.000.000.000	100.000.000.000	2 Kegiatan	100.000.000.000	100.000.000.000	
			Jumlah Pengantar Cegah yang Dikawatir Pengembangan Akutansi dan Indikator Pengukuran Kinerja	1 Kegiatan			1 Kegiatan	100.000.000.000	Kota Bogor, Bogor Timur, Bogor Tengah	PENGKOTATAN AKUTANSI (PAK)	100.000.000.000	100.000.000.000	1 Kegiatan	100.000.000.000	100.000.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kota Bogor dan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2025, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Bogor, 2024

Inspektur Daerah Kota Bogor



DRS. PUPUNG W. PURNAMA, M.SI., QGIA, CGCAE

Pembina Utama Muda
NIP. 19700715 199009 1 002